

PENDIDIKAN GURU: “PEMBEBAS ATAU PEMBELENGGU”

Nursamsiah Asharini

Marketing Communication Department, Faculty of Economic and Communication, BINUS University
Jln. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480
nursamsiah_dikti@yahoo.com

ABSTRACT

Each person will use their cultural knowledge in the interaction, likewise with teachers in their interaction with the students. Knowledges as a teacher, how to educate, and education are learned by the candidate when she/he studies at a teaching insitute of higher learning. Interaction between teacher and students in the classroom reflects the education done in the institute, and become student cultural knowledge.

Keywords: *cultural knowledge, cognitive map*

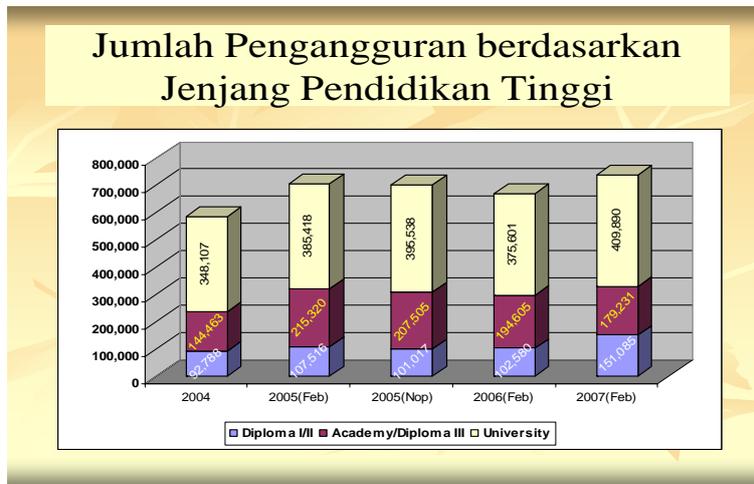
ABSTRAK

Setiap orang akan menggunakan pengetahuan budayanya di dalam berinteraksi, demikian pula guru dalam berinteraksi dengan murid. Pengetahuan tentang guru, mendidik, dan pendidikan diperoleh seorang calon guru selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Interaksi antara guru dengan murid di kelas merefleksikan pendidikan guru di perguruan tinggi dan menjadi pengetahuan budaya murid.

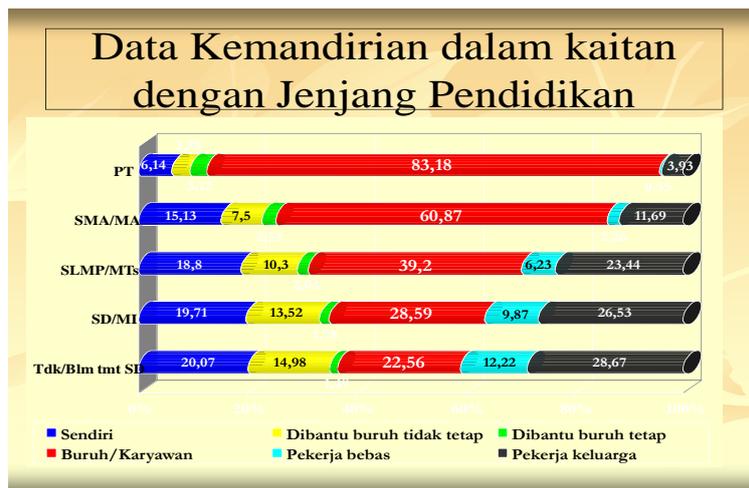
Kata kunci: *pengetahuan budaya, peta kognisi*

PENDAHULUAN

Perbaikan mutu pendidikan melalui perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan setelah lulus pendidikan guru, peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan berbagai peraturan pendidikan, perubahan organisasi di lingkungan kantor pemerintah yang bertanggung jawab atas sektor pendidikan, dan peningkatan dana pemerintah untuk pendidikan belum menunjukkan perbaikan kepada kesejahteraan masyarakat. Data tahun 2004-2007 menunjukkan bahwa jumlah lulusan pendidikan tinggi yang belum bekerja masih tinggi (Gambar 1). Selain itu, pada gambar ditunjukkan makin tinggi pendidikan seseorang, makin tidak mampu untuk menyejahterakan dirinya ketika lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas. Sedangkan gambar selanjutnya (Gambar 2) menunjukkan jumlah penduduk berwirausaha sesuai jenjang pendidikan alternatif.



Gambar 1 Jumlah lulusan Perguruan Tinggi yang menganggur berdasarkan program Pendidikan yang ditempuh



Gambar 2 Jumlah penduduk berwirausaha sesuai jenjang pendidikan alternatif

Kedua data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia belum mampu menjalankan fungsinya untuk mengubah kesejahteraan hidup seseorang. Mengingat bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk memperbaiki kualitas hidup manusia maupun kesejahteraan suatu bangsa, kedua data

jelas menunjukkan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan, di setiap jenjang, baik pendidikan tinggi, menengah maupun dasar. Perguruan tinggi sebagai jenjang tertinggi dalam sistem pendidikan tinggi hanya dapat ditempuh jika calon mahasiswa, telah menyelesaikan jenjang pendidikan di bawahnya. Keberhasilan mencapai jenjang tertinggi pendidikan menunjukkan bahwa seseorang telah berhasil menguasai pengetahuan yang disebarkan (*transmission*) di jenjang-jenjang sebelumnya.

PEMBAHASAN

Peran Guru dan Pendidikan

Guru memiliki peran yang sangat besar dalam proses pendidikan. Dalam proses belajar mengajar guru menjadi sumber pengetahuan yang menentukan benar tidaknya suatu pengetahuan yang dimiliki oleh murid (Sanjaya, 2006). Oleh sebab itu, Romo Mangun ketika mengembangkan pendidikan yang menerapkan kurikulum serta metode belajar mengajar yang berbeda, secara khusus menyiapkan para guru (Pradipta, 2007). Selain berperan sebagai manajer kelas, guru juga berperan sebagai motivator serta fasilitator, dan penyebar pengetahuan (Pradipta, 2007).

Romo Mangun seorang budayawan yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan, terutama pendidikan dasar, menyatakan pendidikan seharusnya: (a) mengantar dan menolong peserta didik untuk mengenal dan mengembangkan potensi-potensi dirinya agar menjadi manusia yang mandiri, dewasa dan utuh, manusia merdeka yang peduli dan solider terhadap sesama dengan jati diri dan citra yang utuh harmonis, dan (b) melihat anak sebagai anak, dengan memberikan kemerdekaan bertindak, berimprovisasi dan bereksperimen terhadap anak; bukan menjadikan anak sebagai kader mini politik atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan industri (Pradipta, 2007:59-67). Menurut Durkheim (1990) pendidikan bukan hanya masalah memungkinkan seorang individu berkembang sesuai dengan kodratnya, atau hanya menyingkapkan segala kemampuan tersembunyi pada si individu yang menunggu penampakkannya. Pendidikan menciptakan makhluk baru (Dicuplik oleh Everett K. Wilson dalam Durkheim, 1990:xiii).

Baik pandangan Romo Mangun maupun Durkheim sangat berkaitan dengan moto tim Ciputra: “*We Are Touching the Future*”. Pendidikan selayaknya memang memerdekakan, menciptakan seorang makhluk baru yang akan berperan pada masa yang datang, terutama pendidikan dasar yang memakan waktu 9 tahun; bukan membelenggu dengan memberikan berbagai materi yang dipandang penting bagi guru dan sekolah tanpa menyingkapkan potensi dan memerhatikan kebutuhan anak.

We Are Touching the Future adalah salah satu moto yang digunakan oleh tim Ciputra dalam melaksanakan pendidikan *entrepreneurship* bagi para staf pengajar di seluruh perguruan tinggi di Indonesia pada 2007-2009, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kata-kata ini memiliki makna yang sangat dalam pada penyelenggaraan pendidikan karena memiliki arti bahwa jika staf pengajar tidak menularkan (*transmission*) ilmu dan pengetahuan yang tepat dengan benar, hasil yang diperoleh akan sangat berbeda atau berlawanan dengan keinginan kata tersebut. Mengingat, pada hakikatnya manusia selalu berkeinginan masa depan akan lebih baik dari masa kini, ataupun masa lalu.

The Future dalam moto tersebut di atas hendaknya dipahami (a) sebagai suatu keadaan di masa depan, dan/atau (b) sebagai pelaksana masa depan (mahasiswa). Dalam arti yang pertama, ditanamkan pengertian kepada staf pengajar bahwa melalui kegiatan pendidikan yang mereka lakukan mereka sedang menciptakan suatu situasi dan kondisi yang akan terjadi pada masa depan. Sedangkan pemahaman kedua menyiratkan bahwa dalam pendidikan para staf pengajar sedang berhadapan dengan individu-individu yang akan menentukan warna keadaan pada masa depan. Kedua makna ini

sangat penting dipahami oleh setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan untuk menyiapkan mahasiswa sebagai pelaksana masa depan, atau agar ilmu serta pengetahuan yang ditularkan benar-benar menghasilkan individu-individu yang mampu menciptakan masa depan yang jauh lebih baik, sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara, masyarakat atau individu itu sendiri.

Menurut Kneller (1966:11) pendidikan merupakan setiap proses yang membantu pemikiran, karakter atau kemampuan fisik seorang individu. Suatu proses yang berjalan sepanjang hidup manusia, karena setiap orang setiap saat harus mempelajari cara berpikir maupun bertindak laku yang baru berkenaan dengan perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupannya. Setiap status baru yang diperoleh ataupun keadaan baru di dalam kehidupan – seperti menikah, menjadi orang tua, dewasa – harus dipelajari, artinya individu tersebut harus secara bertahap menyesuaikan diri dengan bertindaklaku dan berpikiran baru, dan juga belajar tanggung jawab serta tugas sosialnya yang baru.

Pengertian pendidikan oleh Kneller ini menyinyalkan bahwa pendidikan bukan monopoli lembaga-lembaga pendidikan, serta berlangsung dalam setiap kehidupan individu, baik dalam kehidupan bersama dengan individu lain dalam kelompoknya, maupun dalam kehidupan individualnya. Oleh sebab itu, menurut Hansen (1979:30), pendidikan merupakan hal yang universal dalam masyarakat manusia. Dalam pengertian ini pendidikan merupakan proses sosialisasi dan enkulturasi bagi seorang individu. Enkulturasi yaitu proses seorang individu menjadi satu atau bergabung dalam kelompok sosial, dan proses seorang individu memperoleh kemampuan dalam kebiasaan dan pengetahuan kelompoknya (dicuplik Hansen dari Herskovits, 1964:325-329).

Pendidikan di Perguruan Tinggi

Jika pendidikan bersifat universal, maka pengesahan proses pendidikan dan pengembangan persekolahan bukan merupakan hal yang universal (ibid, 30). Menurut Mead, sekolah merupakan salah satu pranata pendidikan yang digunakan oleh masyarakat kompleks ketika pendidikan tidak lagi cukup hanya diperoleh melalui cara anak meniru perilaku orang tua, saudara, atau tetangga, sebagaimana pendidikan yang dilaksanakan dalam masyarakat sederhana (dalam Hansen, 1979).

Dalam upayanya untuk menjelaskan perspektif sosial budaya dalam proses belajar manusia, pendidikan dibedakan sebagai sebuah upaya yang disengaja dan tersistematis untuk menularkan keahlian dan pemahaman, kebiasaan berpikir dan tingkah laku kepada seorang individu sebagai anggota baru suatu kelompok; dan penyekolahan sebagai pendidikan yang dilembagakan yang pelajarnya belajar menjadi orang lain, dalam suatu peran dan lingkungan yang berbeda dari peran dan lingkungan tempat hasil pembelajarannya akan diterapkan. Terhadap hal itu, Hansen (1979:28) menyatakan:

“For our purposes education will denote a subset enculturation: a deliberate and systematic attempt to transmit skills and understandings, habits of thought and deportment required by the group of which learner is a novice member. Schooling will denote institutionalized education in which learners learn.”

Adapun pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi yang menghasilkan guru, selayaknya menganut kedua makna tersebut. Seorang mahasiswa calon guru harus belajar untuk dapat menjalankan perannya sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut yang mengikuti seluruh tata cara yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk menjadi seorang mahasiswa yang baik, dan juga belajar untuk menjalankan perannya kelak sebagai guru yang dapat merangsang kreativitas dan potensi murid. Keberhasilan pendidikan di perguruan tinggi kependidikan adalah jika kedua proses tersebut berjalan selaras.

Agar lulusan memiliki kemampuan akademik serta tingkah laku sesuai dengan kecerdasan ilmunya, maka setiap perguruan tinggi (dan bahkan setiap fakultas) akan mengembangkan kecerdasan yang berbeda, yang tercermin tidak hanya dalam mata kuliah-mata kuliah yang diberikan, pemilihan murid, proses evaluasi, tetapi juga dalam tata cara interaksi, berpakaian, tetapi dapat juga pada tata letak tempat duduk, desain ruang, dll. Perguruan tinggi seni akan menampakkan kekhasan yang berbeda dengan perguruan tinggi sains dan teknologi, ataupun dengan perguruan tinggi kependidikan. Perbedaan budaya antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain, atau antara satu fakultas dengan fakultas lain dapat langsung terlihat, tetapi juga dapat baru diketahui ketika seseorang lama berkegiatan di tempat tersebut.

Untuk memastikan bahwa kecerdasan ini dilaksanakan, setiap perguruan tinggi atau bahkan fakultas menentukannya dalam peraturan tertulis yang berupa standar atau pedoman, atau dapat pula dalam bentuk kebiasaan yang kepastian pelaksanaannya dilakukan melalui teguran atau sanksi yang diberikan kepada dan oleh staf pengajar/staf administrasi atau pimpinan unit akademik, dan kepada mahasiswa. Sesuai dengan keputusan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, ayat (3) yang menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”, maka seluruh perguruan tinggi Indonesia menjadi bagian dari satu sistem pendidikan nasional. Penyelenggaraan perguruan tinggi dan pelaksanaan pendidikan, baik oleh perguruan tinggi negeri (yang dimiliki oleh pemerintah) maupun perguruan tinggi swasta (yang dimiliki oleh masyarakat), harus merujuk kepada berbagai aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah serta mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Di sisi lain sebagai sebuah lembaga akademik, perguruan tinggi juga dalam penyelenggaraannya harus merujuk pada standar kualitas penyelenggaraan akademik yang berlaku bagi setiap lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di mana pun berada, serta menghasilkan lulusan yang memenuhi kualifikasi keahlian sesuai standar bidang ilmunya. Dengan demikian ini berarti bahwa perguruan tinggi kependidikan sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menghasilkan guru tidak hanya harus menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi guru-guru yang mampu menghasilkan “Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif” (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2010, 31 Desember 2010) sebagaimana visi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014, tetapi juga harus menghasilkan guru-guru yang memiliki kualitas untuk “memerdekakan” murid-muridnya dengan memampukan mereka sesuai potensi yang dimiliki oleh mereka.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 25 ayat (1) dan (2) (Hukum Online, n.d.) telah memberikan otonomi kepada perguruan tinggi. Pasal tersebut memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi, dengan mempertimbangkan kekhasan, lokasi keberadaan, serta sumber daya di lingkungan perguruan tinggi. Namun pemberian kemandirian yang luas kepada perguruan tinggi nyatanya belum memberikan hasil yang menggembirakan sebagaimana tampak pada Gambar 1 dan 2.

Pendidikan di Pendidikan Guru

Pengetahuan budaya atau peta kognisi (dalam Spradley, 1972:8) diperlukan seorang manusia untuk memahami tingkah laku serta berbagai kejadian yang dia amati. Dengan pengetahuan ini mereka mempelajari berbagai aturan untuk bertingkah laku yang tepat, dan merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan mereka (Spradley 1972:4). Pengetahuan budaya ini diperoleh seorang individu melalui pengalaman yang ia lalui dan digunakan sebagai alat untuk mempersepsikan, mengorganisasikan serta menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya yang baru (Goodenough dalam Spradley, 1972:7-8).

Selain itu pula penting disimak pernyataan Hansen (1979:2) mengenai kekurangmatangan secara fisiologis dan neurologis, serta kurang kemampuan secara genetis pada bayi manusia untuk menghadapi berbagai rintangan masalah dalam rangka bertahan hidup, yang menyebabkan manusia sangat tergantung dari belajar. Bayi atau anak belajar pertama kali dari lingkungannya melalui pengamatan dan interaksi yang dilakukan bersama teman-teman seusia, atau yang lebih muda, serta orang-orang yang lebih tua. Dalam interaksi ini mereka juga belajar tatacara bertingkah laku yang benar (*the rules of acceptable social behavior*) serta konsekuensi yang harus mereka hadapi jika melanggar tata cara tersebut. Oleh karena itu, peran guru pendidikan dasar cukup besar untuk membangun kemampuan anak, melalui penggalian minat serta pengembangan potensi anak, mempersiapkan anak untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya serta beradaptasi dengan berbagai perubahan pada masa yang akan datang.

Jelaslah bahwa peran perguruan tinggi kependidikan sangat penting terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui lembaga ini dihasilkan guru-guru yang akan berperan dalam merangsang daya pikir, daya juang, daya kreasi, dan kepekaan murid-murid; dan kemampuan para guru untuk “memerdekakan” murid-muridnya, atau menciptakan makhluk baru tersebut, dibentuk melalui pengalaman serta pengetahuan yang diperoleh mereka di kampus. Kebijakan otonomi perguruan tinggi memberikan kewenangan yang besar kepada perguruan tinggi untuk mengelola sendiri perguruan tingginya. Perguruan tinggi diberikan keleluasan untuk menetapkan berbagai tata cara yang akan menjadi penentu dalam menghasilkan kualifikasi dari lulusan.

Kebijakan akademik di perguruan tinggi ditentukan oleh senat perguruan tinggi yang beranggotakan para Guru Besar di berbagai program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut. Sedangkan kebijakan manajemen ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang pemilihannya ditetapkan oleh senat, setelah diseleksi sendiri oleh masyarakat perguruan tinggi, yang meliputi staf pengajar, staf akademik dan mahasiswa. Penetapan seseorang sebagai pimpinan perguruan tinggi, serta kebijakan-kebijakan yang berlaku di perguruan tinggi dapat dikatakan sebagai refleksi pemikiran-pemikiran warga masyarakat perguruan tinggi terhadap harapan mereka akan pimpinan serta aturan yang tepat yang dapat membawa perguruan tinggi tersebut ke arah yang mereka harapkan.

Hansen (1979:1) menyatakan cara berpikir kita, serta segala hal yang kita ketahui, merefleksikan pendidikan yang pernah kita peroleh, dan bahwa struktur pengetahuan kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Terhadap hal itu, Hansen memberikan penjelasan:

“The very structure of knowledge is conditioned by its sociocultural milieu. Our ways of thinking, as well as what we know, reflect the particular kind of education we have received.”

Dengan demikian, berbagai karya yang dihasilkan pimpinan perguruan tinggi serta senat perguruan tinggi dalam bentuk aturan maupun kebijakan, serta ditetapkannya seseorang sebagai pimpinan perguruan tinggi menunjukkan pengalaman yang ia lalui yang mungkin diperolehnya selama belajar di perguruan tinggi yang sama atau dapat pula yang ia peroleh dari pengalamannya di ruang-ruang/tempat lain, dan menunjukkan pula struktur sosial budaya lingkungannya. Namun seperti dinyatakan oleh Blumer (1972:69), makna muncul dalam proses interaksi, dan interaksi manusia hakikatnya adalah interaksi simbolik:

“The meaning of anything and every thing has to be formed, learned, and transmitted through a process of indication – a process that is necessarily a social process. Human group life on the level of symbolic interaction is a vast process in which people are forming, sustaining, and transforming the objects of their world as they come to give meaning to objects. Objects have no fixed status except as their meaning is sustained through indications and definitions that people make of the objects.”

“Human interaction is essentially symbolic interaction.” (Spradley, 1972:16)

Kebijakan maupun aturan adalah simbol yang bermakna arbiter. Walau kebijakan dan aturan tertulis dengan jelas dan rinci, perbedaan persepsi antara setiap orang, dan antara setiap peran dapat berbeda. Pemahaman yang sama dari kebijakan dan aturan dengan demikian hanya dapat dilihat pada penerapannya dalam kegiatan sehari-hari melalui berbagai interaksi yang terjadi. Untuk hal ini Charon (2004:48) menyatakan:

“Symbols are social (recall that all social objects are social). This means that symbols are defined in interaction, not established in nature. People make them, and people agree on what they shall stand for.”

Oleh sebab itu, pemahaman pimpinan perguruan tinggi kependidikan akan kebijakan pemerintah, harus dilihat sebagai pemahaman yang diperoleh tidak semata dari membaca aturan dan kebijakan, tetapi juga dari interaksinya dengan lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam kinerja perguruan tinggi, seperti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan, Badan Akreditasi Nasional, Badan Standar Nasional Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Sekolah, dan lembaga-lembaga lain yang menjadi pemangku kepentingan perguruan tinggi. Lebih lanjut, Charon (2004:81) menyatakan:

“It is the social process in group life that creates and upholds the rules, not the rules that create and uphold group life.”

Pimpinan perguruan tinggi, staf pengajar, staf fungsional, dan staf administrasi pada umumnya di perguruan tinggi negeri adalah pegawai negeri sipil yang memiliki tata aturan, nilai dan norma sendiri yang juga akan mewarnai pengetahuan budaya mereka dalam melaksanakan perannya. Dengan demikian juga dapat membatasi keleluasaan mereka untuk menyusun kebijakan dan aturan sebagaimana yang mereka harapkan, atau dalam melaksanakan kebijakan serta aturan perguruan tinggi. Sebagaimana aturan dan kebijakan pemerintah, maka aturan dan kebijakan yang dikembangkan di perguruan tinggi, selain dapat dipahami melalui interpretasi staf pengajar, staf fungsional, staf akademik, serta mahasiswa terhadap narasi, juga dipahami dari interaksi yang terjadi di dalam kampus (baik di dalam maupun di luar ruang kelas) di antara mereka.

Bagi mahasiswa perguruan tinggi bidang kependidikan, interaksi yang terjadi di perguruan tinggi, selain merupakan sebuah upaya sengaja dan sistematis untuk menularkan keahlian dan pemahaman, kebiasaan berpikir dan tingkah laku yang dituntut oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa yang merupakan anggota baru di perguruan tinggi tersebut, juga sebagai proses perubahan mereka menjadi seorang guru yang meliputi standar, dan bahasa yang digunakan oleh seorang guru, ideologi, serta tingkah laku bahkan sanksi budaya yang menyertainya.

“The concept of enculturation implies that the process of becoming incorporated into a specific culture and learning its norms and patterns is one which continues beyond childhood into adult life, and may include the incorporation of migrants or persons in situations of contact and change into new cultural configurations at any moment in their lives.”
(Seymour-Smith, 1990:93)

“In its most inclusive meaning, enculturation entails acquisition of behavioral skills, knowledge of cultural standard and symbolic codes such as language and art, culturally sanctioned motivations and perceptual habits, ideologies and attitudes.” (Hansen, 1979:27)

Interaksi, menurut Jones (2009:142) adalah proses interpretif dua arah. Tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa, merupakan interpretasi atas tindakan yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi, atau staf pengajar, atau staf fungsional, atau staf administrasi. Interpretasi mahasiswa tersebut akan berpengaruh terhadap pimpinan perguruan tinggi, atau staf pengajar, atau staf fungsional, atau staf administrasi. Demikian pula sebaliknya (Spradley, 1972:65). Namun tanpa

disadari, interaksi yang terjadi selama proses pendidikan di perguruan tinggi ini yang menanamkan kepada mahasiswa (calon guru) citra diri seorang guru (Jones, 2009:143). Pengetahuan budaya serta citra diri inilah yang akan memengaruhi dirinya kelak ketika menjalankan proses pendidikan di sekolah sebagai seorang guru dalam berinteraksi dengan siswa/anak didiknya, yang secara tidak disadarinya akan menentukan jika proses pendidikan yang berlangsung membelenggu atau membebaskan anak didik.

SIMPULAN

Data pada Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa proses belajar yang berlangsung di pendidikan guru tidak/atau membatasi pemberian ruang kepada calon guru untuk berkreasi dalam menggali potensi untuk melaksanakan perannya. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan evaluator yang memerdekakan murid. Peran-peran tersebut memberikan kebebasan murid untuk menggali semaksimal mungkin potensi yang dimiliki mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Blumer, H. (1972). *Culture and Cognition: Rules, Maps and Plans*. Worcester, USA: Chandler Publishing.
- Charon, J. M. (2004). *Symbolic Interactionism. An Introduction, An Interpretation, An Integration*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Durkheim, E. (1990). *Pendidikan Moral. Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Hansen, J. F. (1979). *Sociocultural Perspectives on Human Learning: An Introduction to Educational Anthropology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hollan, D. (2000). Constructivist Models of Mind, Contemporary Psychoanalysis, and the Development of Culture Theory. *American Anthropologist*. Vol. 102 (3):538-550.
- Hukum Online. (n.d.). *Undang-undang No. 20 Tahun 2003*. Diakses 3 September 2013 dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13662/node/538/uu-no-20-tahun-2003-sistem-pendidikan-nasional>
- Jones, P. (2009). Terj. Achmad Fedyani Saifuddin. *Pengantar Teori-teori Sosial. Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pradipta, Y. D. (2007). *Belajar Sejati versus Kurikulum Nasional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sanjaya, W. (2006). *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Seymour-Smith, C. (1990). *Macmillan Dictionary of Anthropology*. London: The Macmillan.
- Spradley, J. P. (1972). *Culture and Cognition: Rules, Maps and Plans*. Worcester, USA: Chandler Publishing.